

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kajian tentang ulama merupakan substansi yang memberikan dampak yang sangat besar dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Ulama termasuk sebagai pemimpin pendapat, karena memiliki ilmu agama yang luas. Sebagai aktor dalam kajian komunikasi politik, ulama memiliki posisi yang setara sebagai *Opinion Leader* atau pemimpin pendapat.<sup>1</sup> Ulama berada pada kedudukan yang sangat penting untuk membentuk tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ulama juga masuk dalam kategori sebagai pemimpin informal. Sebagai pemimpin informal, mereka akan didengar, dihormati, dihargai dan diikuti atas pesan-pesannya dalam kehidupan. Mengikuti Kartini Kartono (2009), pemimpin informal yaitu orang yang tidak mendapatkan pelantikan formal sebagai pemimpin. Dalam konteks ini adalah pelantikan formal daripada pihak pemerintah. Namun karena pemimpin informal mempunyai sejumlah kualitas atau keunggulan, pemimpin informal mencapai kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi psikologi dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.

Ulama yang menyadari kedudukan mereka sebagai pewaris nabi, merasa bertanggungjawab untuk terlibat secara langsung dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, peran ulama tidak sekedar bergelut pada aspek Ibadah *Mahdhah*, memberikan fatwa, atau berdoa. Tetapi, termasuk juga peran agama dalam bidang lainnya; politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya, sesuai

---

<sup>1</sup>Fitra Siagian, Haidir. 2012. *Komunikasi Politik : Ulama Sebagai Komunikator Politik*. Malaysia: Alauddin University Press. Hlm. 4.

dengan kekomprehensifan ajaran Islam itu sendiri serta menilai baik-buruknya kesan yang diberikannya berdasarkan nilai-nilai yang diamanatkan Tuhan melalui Kitab Suci-Nya (Shihab, 2001). Sebagaimana dikatakan oleh Agustianto (Rohidin 2007), membatasi peran ulama pada persoalan agama, fatwa dan akhlak saja, merupakan kekeliruan besar, karena hal itu dipandang sebagai *a historis*. Sebab dalam sejarah, peran ulama sangat luas seluas ajaran Islam yang komprehensif itu pula. Pada masa penjajahan, ulama turut serta dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ulama saat itu justru menjadi panglima perang. Sebutlah misalnya, Pangeran Diponegoro, dan Imam Bonjol. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat yang dikutip dari (Azis, 2011) Ulama Birokrat (penghulu), termasuk kaum intelektual dan cendekiawan muslim (*the muslim learned*) di Perguruan Tinggi Islam, juga harus memiliki idealisme untuk melakukan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, terutama idealisme untuk melakukan perubahan terhadap sistem birokrasi yang cenderung korup terhadap struktur kekuasaan yang tidak adil (*mendzalimi*) dan tidak demokratis.

Reformasi di Indonesia telah mengubah konstelasi perpolitikan nasional. Dengan adanya kebebasan dan keterbukaan dalam masyarakat, mereka dapat menyuarakan aspirasinya dengan berbagai cara tanpa mengganggu masyarakat lainnya. Pada perkembangan dunia politik era reformasi, para ulama juga dapat berkiprah dengan lebih terbuka.<sup>2</sup> Sebelumnya pada masa orde baru, kebijakan pemerintah banyak dipengaruhi oleh peran militer Indonesia. Presiden Soeharto yang berasal dari elit militer tidak lepas dari masalah itu. Kebijakan mereka cenderung dipengaruhi oleh budaya politik Abangan. Pada masa itu, ada semacam

---

<sup>2</sup>Hamdan Basyar. *Dinamika Peran Ulama Dalam Perpolitikan Nasional Pasca-Orde Baru*. Vol. 5, No. 1, 2016. Hlm. 73.

*Islamic Phobia* yaitu ketakutan terhadap Islam. Perasaan seperti itu banyak menjangkiti kalangan elit politik Indonesia masa orde baru. Mereka tidak menghendaki berkembangnya Islam dalam kehidupan politik Indonesia. Oleh karena itu, penguasa orde baru melakukan imarjinalisasi peranan agama dalam politik formal.<sup>3</sup> Ulama sebagai tokoh Islam dibatasi perannya hanya untuk mengurus soal-soal keagamaan. Akibatnya, ulama yang sebelumnya aktif dalam politik merasa kecewa dan mereka kembali ke pesantren atau hanya menjadi *mubaligh* (juru dakwah).

Pada masa orde baru, Islam sebagai ideologi kelompok ataupun partai tidak dapat diakomodir oleh elit politik. Alasan yang sering dikemukakan adalah Indonesia menganut sistem pluralisme, baik dari segi agama maupun etnisitas. Oleh karena itu, *Bhinneka Tunggal Ika* harus yang terdepan. Walaupun Indonesia merupakan negara penganut Islam mayoritas, tetapi sebagai ulama tidak dapat dan tidak boleh mengedepankan ideologi Islam untuk kepentingan bernegara.

Dalam perkembangan berikutnya, kalangan santri modern mendirikan organisasi yang diberi nama Ikatan Cendekiawan Muslim se- Indonesia (ICMI). Pada Desember 1990, ICMI lahir setelah simposium tiga hari di Universitas Brawijaya Malang yang dibuka oleh Presiden Soeharto. Kehadiran Presiden dianggap sebagai restu berdirinya organisasi yang menampung para cendekiawan muslim. Kehadiran ini juga dikomentari oleh sekelompok orang sebagai label

---

<sup>3</sup>Ini bagian dari “penjinakan radikalisme dalam politik melalui proses depolitisasi massa” Lihat Abdul Azis Thaba. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press. Hlm 188. Cara penguasa Orde Baru tersebut juga dimaksudkan untuk memotong gigi politik Islam karena Islam lah yang selama ini dianggap sebagai pesaing politik utama pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Lihat Bahtiar Effendy. 2001. *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*. Yogyakarta : Galang Press. Hlm 144-14.

bahwa ICMI adalah alat pemerintah dengan alasan Ketua ICMI merupakan menteri dalam kabinet Soeharto tersebut.

Kelahiran ICMI pada masa orde baru, bukanlah tanpa sebab dan tujuan. Bachtiar Effendi melihat bahwa pendirian ICMI ini tidak lain sebagai bentuk pengakomodiran terhadap komunitas muslim yang saat itu menjadi kekuatan yang berperan sangat signifikan dalam pembangunan bangsa. Pengakomodiran berbagai bentuk kepentingan politik umat Islam ini dikenal dengan “Teori Akomodasi” yang dicetuskan oleh Bachtiar Effendi, yang meliputi empat ranah.<sup>4</sup>

ICMI mulai membangun hubungan kemitraan baik dengan pemerintah maupun militer. Pada masa tersebut, muncul harapan besar di kalangan umat Islam melalui ICMI, yaitu umat Islam akan mengalami proses mobilitas sosial. Hal ini nampak menyolok terutama karena banyaknya orang Islam yang duduk dalam kekuasaan.<sup>5</sup> Berkembangnya ICMI di kalangan cendekiawan yang umumnya berada di lembaga pemerintah dan swasta, melahirkan dan meningkatkan kesadaran baru dalam keberagaman umat Islam sehingga dapat mengembangkan etika dan etos sebagai bagian terpenting dalam menjalankan peran sosial keagamaan di Indonesia.<sup>6</sup>

Kajian peran ulama terhadap perkembangan proses demokrasi di Indonesia pada masa era reformasi, menjadikan penelitian ini dapat mengetahui bahwa ulama memiliki sejarah keterlibatan dalam proses demokrasi. Jurnal penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya yang berjudul “Dinamika Peran Ulama Dalam Perpolitikan

---

<sup>4</sup>Tedi Kholiludin. *ICMI masihkah menjadi Intelektual Tukang?* Semarang: Surat Kabar Mahasiswa AMANAT, edisi 105/ Januari-Februari 2006, hlm. 20.

<sup>5</sup>Eko Prasetyo. 2002. *Membela Agama Tuhan; Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global*. Jogjakarta: INSIST Press. Hlm. 86.

<sup>6</sup>Sudirman Teba. 2001. *Islam Menuju Era Reformasi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. Hlm. 92-93.

Nasional Indonesia” yang ditulis oleh Hamdan Basyar, mendeskripsikan peran ulama yang mulai memasuki ranah pemerintahan setelah terjadinya *Islamic Phobia* (Islam merupakan sebuah ketakutan dalam Negara Indonesia) pada masa Soekarno. Setelah terbentuknya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang membawa para santri terjun ke dunia perpolitikan Indonesia, membuat nilai-nilai keislaman kembali berkiprah serta menjadi harapan baru bagi kaum muslim di Indonesia pada masanya.<sup>7</sup> Hal ini sangat memperkuat bahwa ulama sebagai kekuatan Islam merupakan keutuhan dalam negara Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Namun, pada penelitian ini berusaha mendeskripsikan pengaruh ulama sebagai aktor utama dakwah Islam terhadap perkembangan demokrasi khususnya di Sumatera Barat.

Studi tentang ulama atau kiai juga pernah diteliti oleh beberapa peneliti ternama lainnya. Mereka antara lain Clifford Geertz, Leonard Binder, Deliar Noer, Zamakhsyari Dhofier, dan Hiroko Horikoshi. Penelitian Geertz menjelaskan bahwa yang membuat seorang kiai menjadi karismatik adalah karena perannya sebagai perantara budaya (*cultural broker*). Karena perannya, seorang kiai dapat berfungsi sebagai pemersatu dalam masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tetapi, menurut Geertz, ulama atau kiai tradisional tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman apapun dalam dunia politik. Para elit agama itu menjadi besar dan mempunyai karisma yang tinggi hanya karena perannya sebagai perantara budaya.<sup>8</sup> Namun, pendapat Geertz tersebut dibantah oleh Binder. Binder menjelaskan bahwa salah

---

<sup>7</sup>Hamdan B., loc.cit.“Tulisan tersebut merupakan perbaikan bahan pada Seminar Nasional Revitalisasi Peran Politik Ulama dan Kiai dalam Kancah Perpolitikan Nasional yang diselenggarakan oleh STAI Darussalam Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 31 Oktober 2007”.

<sup>8</sup>Clifford Geertz. 1960. *The Javanese Kijaji: The Changing Roles of A Cultural Broker*. Dalam *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 2, hlm. 220-249.

satu kekeliruan yang dibuat oleh Geertz dalam menggambarkan sosok seorang ulama atau kiai adalah karena ia menyamakan kedudukan kiai dengan para ulama di Timur Tengah. Padahal basis kiai di Jawa berbeda dengan basis ulama di Timur Tengah. Di Jawa, para kiai mempunyai basis di pedesaan sedangkan para ulama Timur Tengah mempunyai basis di perkotaan.<sup>9</sup> Pendapat dari Geertz tersebut didukung oleh pernyataan Deliar Noer yang menyatakan bahwa pada umumnya para kiai tradisional tidak turut dalam masalah politik. Bidang tersebut diserahkan urusannya kepada kalangan adat dan priyayi. Para kiai lebih asyik tenggelam dalam dunia ibadah dan kegiatan pesantren. Mereka kurang aktif dalam menentang penjajah.<sup>10</sup> Pendapat Noer tersebut tentunya dapat diperdebatkan karena ada di antara ulama yang justru menggalang kekuatan untuk menentang penjajahan tersebut di Indonesia.

Selanjutnya Dhofier yang melakukan penelitian di beberapa pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan kepada Geertz bahwa pesantren bukanlah sekedar lembaga tempat mempelajari masalah agama saja yang terlepas dari masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat lingkungannya. Dhofier juga menganggap Deliar Noer kurang memahami kalangan Islam Tradisional. Hal ini disebabkan karena Noer lebih banyak bertumpu pada sumber-sumber yang berasal dari kaum modernis. Dhofier juga menunjukkan adanya keterlibatan kaum tradisionalis dalam dunia politik. Buktinya adalah perolehan suara Nahdhatul Ulama (NU) dalam pemilihan umum tahun 1971 yang mencapai 18,67%. Angka perolehan ini menurutnya jauh di atas perolehan Partai Muslimin

---

<sup>9</sup>Leonard Binder. 1960. *The Islamic Tradition and Politics The Kijaji and The Alim*. Dalam *Comparative Studies in Society and History*. Vol 2, hlm 250-255.

<sup>10</sup>Deliar Noer. 1973. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia*. Jakarta. hlm 10-19.

Indonesia (Parmusi) yang dianggap sebagai Wakil Islam Modern.<sup>11</sup> Walaupun demikian, Dhofier membenarkan pernyataan yang ditulis Deliar Noer bahwa di dunia pesantren yang terjadi adalah proses satu arah. Seorang kiai digambarkan sebagai guru yang tidak dapat dibantah oleh para santrinya dan akan ada sanksi yang berat bagi pelanggarnya.

Horikoshi yang mengadakan penelitian di pesantren Cipari, Garut, Jawa Barat berpendapat bahwa kiai mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat pedesaan bukan karena perannya sebagai perantara budaya seperti yang dikatakan Geertz. Kedudukan kiai yang demikian tinggi justru karena adanya kemampuan kiai dalam bidang lain misalnya sebagai motivator dalam perubahan sosial dan politik. Horikoshi membedakan kiai dan ulama. Kiai adalah seorang ahli agama dan mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran para pengikutnya. Seorang kiai dipandang sebagai lambang kewahyuan yang mampu menjelaskan masalah teologi yang sulit kepada masyarakat kalangan bawah sesuai dengan pandangan dan suara hati mereka. Sebaliknya, Horikoshi menyebut ulama sebagai Pejabat Keagamaan Fungsionaris Agama. Dia menjabat urusan keagamaan pada pranata keulamaan Islam yang secara tradisional telah dilestarikan oleh keluarga kalangan menengah pedesaan yang kuat.<sup>12</sup> Horikoshi menganggap keberadaan ulama berkaitan erat dengan keberadaan pesantren. Artinya tanpa adanya pesantren, ulama tidak mempunyai arti. Hal ini berbeda dengan Dhofier yang berpendapat bahwa justru ulama yang merupakan elemen terpenting dalam suatu lembaga

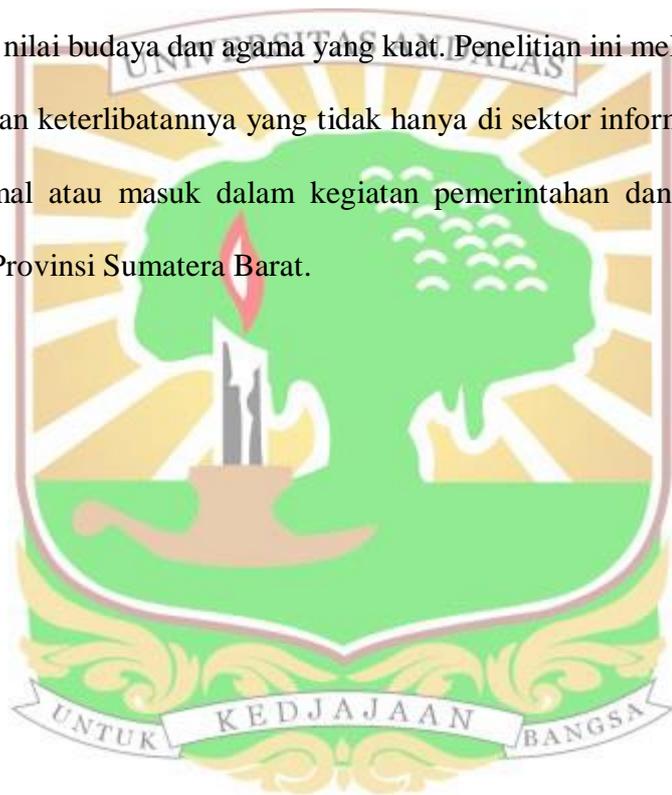
---

<sup>11</sup>Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES 1982.

<sup>12</sup>Hiroko Horikoshi. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta : 1987.

pesantren. Dengan begitu, ulama menduduki peran sentral dalam keberadaan pesantren.

Penelitian ini menegaskan bahwa walaupun kajian tentang ulama sudah dilakukan oleh Clifford Geertz, Leonard Binder, Deliar Noer, Zamakhsyari Dhoefier, dan Hiroko Horikoshi, penelitian tersebut tidak mengkorelasikannya dengan perkembangan demokrasi, terutama hubungannya dengan masalah-masalah yang terjadi di tataran empiris di daerah yang kehidupan masyarakatnya terikat dengan sistem nilai budaya dan agama yang kuat. Penelitian ini melihat pentingnya peran ulama dan keterlibatannya yang tidak hanya di sektor informal bahkan juga di sektor formal atau masuk dalam kegiatan pemerintahan dan perkembangan demokrasi di Provinsi Sumatera Barat.



## 1.2. Rumusan Masalah

Provinsi Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang sangat kental dengan nilai-nilai keislaman. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya falsafah alam Minangkabau yaitu *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Falsafah ini merupakan puncak dari pengaruh masuknya Islam ke Minangkabau. Hal tersebut dapat dilihat dengan dirubahnya falsafah adat sebanyak empat kali yang pada awalnya berfalsafah *Alam Takambang Manjadi Guru* hingga berubah terakhir kali menjadi *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Perubahan-perubahan yang terjadi sebanyak empat kali tersebut merupakan penyesuaian antara adat dengan agama Islam yang masuk hingga menjadi satu-satunya agama yang diakui oleh masyarakat Minangkabau hingga saat ini.<sup>13</sup> Falsafah ini menunjukkan bahwa Minangkabau merupakan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan merupakan daerah yang didominasi oleh muslim atau penduduk beragama Islam.

Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki budaya yang kental dengan nilai-nilai Islam. Dapat diketahui sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa falsafah hidup orang Minangkabau adalah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Oleh karena itu, hal tersebut memberikan gambaran umum bahwasanya segala perkataan, tindakan atau perbuatan dari warga Minangkabau selalu mengacu kepada falsafah ini. Falsafah ini tentunya juga mempengaruhi aspek kehidupan sosial politik di Sumatera Barat. Fenomena politik nasional yang terjadi sampai saat ini tentunya memberikan sebuah reaksi politik dari warga Minangkabau sendiri. Dari lapisan-lapisan yang ada, Sumatera Barat

---

<sup>13</sup>Yelia Nathassa Winstar. *Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau*. Vol. 37, No. 2, April-Juni 2007. Hal. 155.

memiliki banyak bentuk model praktik sosial politik yang telah dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung terkhusus dari sektor para ulama.

Sebagai contoh sejarah partisipasi ulama yang terkenal dari Provinsi Sumatera Barat terhadap perkembangan politik di Indonesia adalah Buya Hamka. Buya Hamka yang memiliki nama lengkap Abdul Malik Karim Amrullah ini merupakan salah seorang ulama dan merupakan seorang ideolog ternama dalam sejarah perkembangan yang mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Hamka dengan Partai Masyumi membawa agenda pemasukan Syariat Islam sebagai dasar negara. Dalam salah satu penelitian terhadap novel "HAMKA", membenarkan bahwa Hamka merupakan salah satu tokoh perwakilan umat Islam yang membawa semangat *Pan-Islamisme* dalam penegakan Syariat Islam di Indonesia.<sup>14</sup>

Dalam sendi filosofi adat atau budaya Minangkabau, nagari memiliki nilai-nilai kebersamaan yang diungkapkan oleh mamangan adat, yaitu *duduak sorang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang* (duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang). Selain itu, salah satu syarat berdirinya nagari adalah adanya surau atau masjid raya. Oleh karena itu, keluarnya kedua aturan tersebut memunculkan gerakan "*Kembali ka Nagari*" dan "*Kembali ka Surau*" sebagai sebuah wacana populis. *Surau* dan *nagari* adalah ruang utama pembentukan identitas sosio-kultural orang Minang sejak lama. Keduanya saling berkaitan dan menguatkan. Konsep "*Kembali ka Nagari*" membentuk identitas secara vertikal, sementara "*Kembali ke Surau*" secara horizontal. Namun fungsi

---

<sup>14</sup>Dian Ismi Islami dan Reygi Prabowo. *Ideologi dan Aktivitas Politik Buya Hamka Dalam Novel "Hamka: Sebuah Novel Biografi"* Karangan Haidar Musyafa. Vol. 2, No. 1, Maret 2019. Hal. 80-92.

dan peran pola ideal ini tidak berlaku ketika para ulama lokal justru menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap pemda.<sup>15</sup>

Selama perkembangan demokrasi di Sumatera Barat, pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini yang dimaksud adalah Gubernur, Walikota, dan Bupati, mendapat posisi strategis dalam masyarakat terutama menyangkut perubahan mendasar di Sumbar, yakni implementasi wacana “*Kembali ka Nagari*”, dan “*Kembali ka Surau*”. Dua konsep ini pada awalnya memposisikan dua institusi utama sebagai pelaksana, yakni “*Kembali ka Nagari*” sebagai tanggung jawab pemda, dan “*Kembali ka Surau*” sebagai tanggung jawab para ulama. Sementara itu, kaum adat memposisikan diri dalam dua ruang strategis tersebut yaitu mendesak kepentingan vitalisasi nilai-nilai tradisi Minangkabau. Oleh karena itu, kaum adat mendukung dua komponen strategis lainnya (pemda dan ulama).<sup>16</sup>

Dalam perkembangannya, ketiga komponen ini berusaha memberi definisi secara substansial atas identitas keminangkabauan masyarakat Minang. Pertanyaan siapa dan apa yang disebut orang Minang itu dikonstruksi secara berbeda dan pada akhirnya menjadi kontestasi antara kaum adat, kaum agama, dan pemda. Namun ketiganya tampak setuju bahwa konstruksi identitas itu berada pada ruang yang mereka namakan dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABSSBK).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Yudhi Andoni. 2009. “*Mengonstruksi Ruang Identitas: Fenomena Hubungan Adat, Islam dan Negara di Sumatera Barat 1999-2009*”. Laporan Penelitian. Padang: Ilmu Sejarah Universitas Andalas. hlm. 4.

<sup>16</sup>Ibid.

<sup>17</sup>Ruang ABSSBK memiliki dua pintu utama, yakni secara vertikal yang dipresentasikan oleh nagari, dan horizontal yang diwakili oleh surau. Lebih jauh dapat dijelaskan, makna adat dalam ABSSBK menjabarkan kedudukan masyarakat yang memiliki nilai-nilai dan standar moral yang mengikat semua eksponennya. Sedangkan syarak dalam terminologinya mengarah pada payung moralitas, yakni agama dan kitab suci, khususnya alquran. Maka dari itu, ruang ABSSBK ini menjadi wadah penggodokan generasi muda Minang, yang tidak saja humanis, tapi juga Islami dalam efek negatif modernitas.

Kaum adat, kaum agama, dan pemda berusaha menunjukkan signifikansi peran mereka dalam merumuskan serta mengimplementasikan ABSSBK tersebut. Pemandangan dari luar memang tampak ketiganya berusaha mengeliminir konflik kepentingan di antara mereka, namun di lapangan ketiganya justru berlomba-lomba menunjukkan kepopulisan masing-masing sebagai “pahlawan” ABSSBK. Namun tidak jarang juga terjadi perdebatan di antara satu unsur yang sama mengenai perkembangan Islam dan demokrasi itu sendiri.

Pada fakta perkembangan demokrasi yang lain, fenomena Islam dan demokrasi di Sumatera Barat dapat dilihat pada perdebatan mengenai berlakunya konsep “Islam Nusantara” di Indonesia yang berujung penolakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat. Penolakan yang terjadi pada kurun waktu 2015-2018 terhadap gagasan “Islam Nusantara” oleh MUI Sumatera barat tersebut memberikan sebuah alasan bahwa akan banyak muncul kesenjangan serta perselisihan paham yang akan meresahkan masyarakat Minangkabau. MUI Sumatera Barat yang diketuai oleh mantan Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat pada tahun 2015 silam yaitu Buya Gusrizal Gazahar, menolak atas dua dasar pendapat yaitu ditinjau dari segi historis dan politik.<sup>18</sup> Jika dilihat dalam tinjauan historis, maka di Minangkabau tidak pernah melabeli Islam dengan nama apapun, sekalipun konsep atau gagasan yang dikemukakan memberikan prinsip toleran dan kesejukan disuguhkan dalam konsep ini karena prinsip yang ada dalam konsep “Islam Nusantara” tersebut telah ada sejak 180 tahun silam di Minangkabau. Jika dilihat dalam tinjauan politik, konsep “Islam Nusantara” hanyalah nilai jual politik

---

<sup>18</sup>Fikri, Husnul. 2019. “*Reinterpretasi Keputusan Penolakan Konsep Islam Nusantara Oleh MUI Sumatera Barat*”. Tesis. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hal. 39-40.

dalam kekuasaan rezim. Namun juga dikatakan bahwa penolakan gagasan ini juga berdasarkan atas pengukuhan MUI Sumatera Barat sebagai payung besar umat Islam di Sumatera Barat.<sup>19</sup>

Selanjutnya mengenai fakta perkembangan fenomena Islam dan demokrasi di Sumatera Barat dapat dilihat melalui perkembangan indeks demokrasi di Sumatera Barat yang menurun pada tahun 2018. Persoalan yang terjadi di Sumatera Barat ini adalah pada beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2018 dan diperkuat dengan data IDI Sumbar 2019 mendapatkan indeks demokrasi terendah nomor lima di Indonesia. Kepala BPS Sumbar, Sukardi, mengatakan Sumbar tergolong daerah yang memiliki indeks demokrasi yang fluktuatif. Pada 2009, Indeks Demokrasi Sumbar bertengger di rentang sedang. Kemudian menurun ke kategori buruk dengan nilai 54,11 pada 2013. Meski sempat naik ke kategori sedang pada 2015 dengan nilai 67,46 poin, pada 2016 IDI Sumbar kembali anjlok ke 54,41 dan memaksa Sumbar masuk ke kategori buruk.<sup>20</sup>

Pada tanggal BPS merilis indeks demokrasi Sumatera Barat 2019 yaitu tanggal 05 Agustus 2020 menghasilkan beberapa perubahan yakni naik 0,63 poin dari indeks demokrasi Sumatera Barat tahun 2018 artinya dari 67,06 menjadi 67,69.<sup>21</sup> Kenaikan yang terjadi tidak memberikan perubahan peringkat Indeks Demokrasi Sumatera Barat di Indonesia yaitu peringkat terendah nomor lima. Ini menunjukkan permasalahan indeks demokrasi di Sumatera Barat masih dikategorikan sebagai problematika demokrasi dan demokratisasi yang harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Sumatera Barat.

---

<sup>19</sup>Ibid. Hal. 40.

<sup>20</sup>sumbar.bps.Go.id.

<sup>21</sup>Ibid.

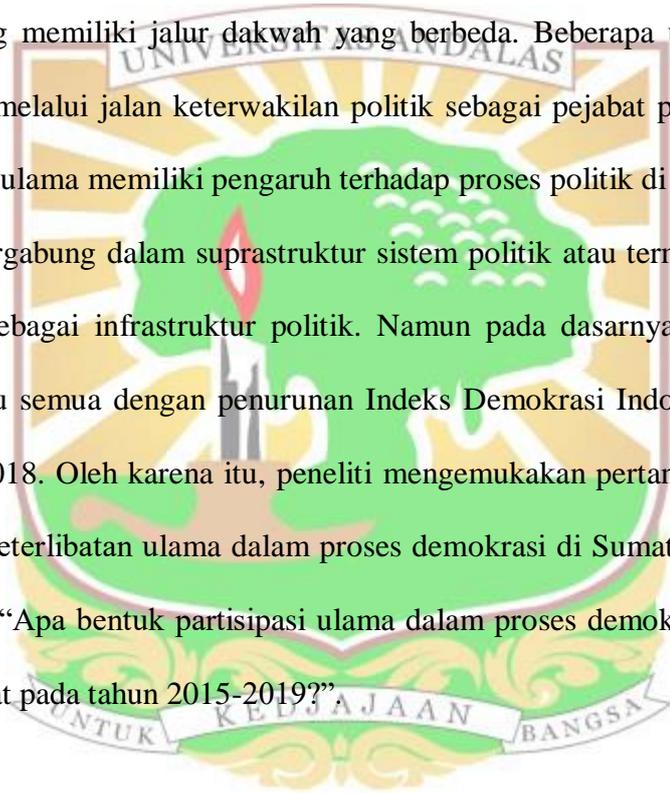
Adapun variabel atau indikator yang membuat buruknya indeks demokrasi di Sumatera Barat yang juga berkaitan dengan unsur-unsur keislaman yaitu terhadap aturan kebebasan sipil seperti aturan mengenai pelarangan Hari Raya Valentine di Kabupaten Dharmasraya, aturan pemakaian baju kurung di Padang Panjang, kemudian adanya pernyataan Bupati Solok Selatan yang akan mencopot jabatan bagi yang tidak ikut sholat berjamaah. Fenomena aturan kebebasan sipil tersebut yang memberikan sebuah asumsi kuat dikaitkan dengan adanya fenomena keterlibatan ulama sebagai penyebar nilai-nilai keislaman sehingga mempengaruhi perkembangan indeks demokrasi di Sumatera Barat. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya beberapa ulama yang berada dalam suprastruktur Pemerintahan Sumatera Barat.

Fenomena Islam dan demokrasi di Sumatera Barat tersebut menjadikan penelitian ini berasumsi bahwa penjabaran mengenai menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia di Sumatera Barat tahun 2018 berkaitan dengan adanya faktor keterlibatan ulama sebagai mediator dakwah Islam serta akibat dari isu ulama yang berkembang selama lima tahun di Sumatera Barat. Hal tersebut juga diperkuat dengan ulama yang sudah lama terlibat dalam konteks demokrasi di Sumatera Barat di kursi pemerintahan. Konsep yang mendasari asumsi penelitian ini adalah bahwa berdasarkan pengaruhnya, ulama terbagi kepada tiga karakter yaitu ulama dependen (ulama berpengaruh yang berada dalam kedudukan suprastruktur), ulama independen (ulama berpengaruh, bebas atau tidak terikat), dan ulama organisasi



(ulama berpengaruh yang berada dalam organisasi masyarakat tertentu) (Pulungan dan Zulkifli, 2005).<sup>22</sup>

Dari penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa fakta-fakta yang ada menunjukkan terdapat keterlibatan ulama dalam proses demokrasi di Sumatera Barat. Ulama tentunya memiliki sebuah tujuan bagaimana nilai-nilai keislaman dirasakan oleh setiap umat. Sumatera Barat yang memiliki banyak tokoh ulama, masing-masing memiliki jalur dakwah yang berbeda. Beberapa ulama memiliki jalur dakwah melalui jalan keterwakilan politik sebagai pejabat publik. Pada sisi lain, beberapa ulama memiliki pengaruh terhadap proses politik di Sumatera Barat tetapi tidak tergabung dalam suprastruktur sistem politik atau termasuk golongan kepentingan sebagai infrastruktur politik. Namun pada dasarnya, penelitian ini mengaitkan itu semua dengan penurunan Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Barat tahun 2018. Oleh karena itu, peneliti mengemukakan pertanyaan penelitian “Bagaimana keterlibatan ulama dalam proses demokrasi di Sumatera Barat tahun 2015-2019?”. “Apa bentuk partisipasi ulama dalam proses demokrasi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015-2019?”



---

<sup>22</sup> Nurseri Hasnah Nasution. 2017. “Ulama dan Politik: Keterlibatan Ulama Sumatera Selatan dalam Politik Praktis dan Community Empowerment Pada Abad XX”. Jurnal Studi Sosial dan Politik, Vol. 1 No. 2, hlm 129.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis keterlibatan ulama dalam proses demokrasi di Sumatera Barat tahun 2015-2019. Hal tersebut juga memberikan deskripsi peran ulama sehingga mempengaruhi Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Barat.
- b. Mendeskripsikan partisipasi ulama dalam proses demokrasi Sumatera Barat untuk mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara di Sumatera Barat.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Secara Akademis, diharapkan penelitian ini dapat menyumbang penjelasan baru terkait dengan kajian Islam dan politik di Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Kajian Islam dan politik di Sumatera Barat yang dimaksud adalah tentang “Keterlibatan Ulama Dalam Proses Demokrasi di Sumatera Barat”. Pembahasan mengenai keterlibatan ulama yang dijelaskan dalam penelitian ini bermaksud untuk memberikan sebuah pernyataan bahwa peran ulama yang tidak hanya sebatas berperan sebagai aktor dakwah tetapi juga mempengaruhi perkembangan demokrasi di Sumatera Barat.

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keterlibatan ulama dalam perkembangan proses demokrasi di Sumatera Barat. Informasi yang diberikan tersebut, dapat memberikan pengetahuan mengenai para ulama juga berperan dalam membangun harmonisasi demokrasi di Sumatera Barat.